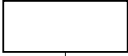
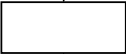
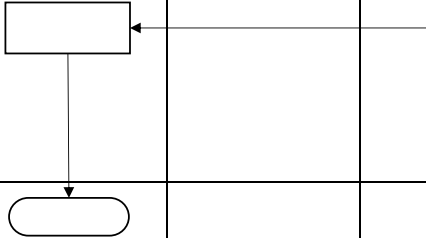


 PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	NOMOR SOP	: DKP/SEKRET/UMPEG/09
	TGL PEMBUATAN	: 09 Februari 2026
	TGL REVISI	: 09 Februari 2027
	TGL PENGESAHAN	: 09 Februari 2026
	DISAHKAN OLEH	 Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah ENDI FAIZ EFFENDI, S.Pi, M.A NIP. 19710909 199603 1 006
	JUDUL SOP	UJI KONSEKUENS PUBLIK
DASAR HUKUM:		KUALIFIKASI PELAKSANA:
1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 3 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik 4 Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah 5 Pergub Jawa Tengah Nomor 43 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah		1 Memiliki pengetahuan mengenai Pelayanan Prima 2 Memiliki pengetahuan mengenai PPID 3 Memiliki komitmen bekerja sama dalam tim 4 Memiliki pengetahuan tentang keamanan informasi 5 Memiliki pengetahuan tentang kearsipan dan pendokumentasian data dan informasi
KETERKAITAN:		PERALATAN/ PERLENGKAPAN:
1 SOP Pemutakhiran dan Penetapan DIP 2 SOP Pelayanan Permohonan Informasi Publik 3 SOP Pendokumentasian Informasi Publik 4 SOP Pendokumentasian Informasi Publik yang Dikecualikan 5 SOP Penerbitan dan Publikasi Maklumat Pelayanan 6 SOP Publikasi Informasi Publik 7 SOP Permohonan Informasi Publik 8 SOP Pengelolaan Keberatan Informasi Publik 9 SOP Fasilitas Sengketa Informasi Publik		1 Formulir Isian 2 Komputer 3 Pesawat Telepon 4 Jaringan Internet 5 ATK 6 Daftar data dan informasi publik yang dikuasai oleh Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah
PERINGATAN		PENCATATAN DAN PENDATAAN:
1 Bila prosedur ini terlewati maka mekanisme keterbukaan informasi publik terhambat 2 Bila prosedur ini tidak berjalan maka pelayanan prima tidak akan tercapai 3 Bila prosedur ini tidak berjalan maka citra positif pemerintah daerah terhadap masyarakat menjadi negatif		Disimpan dalam bentuk data manual dan data elektronik

SOP Uji Konsekuensi Publik

No	Kegiatan	PELAKSANA			MUTU BAKU			Keterangan
		PPID Pelaksana	Pejabat pada Unit Kerja yang Menguasai dan Mengelola Informasi	Atasan PPID	Kelengkapan	Waktu	OUTPUT	
1	Melakukan koordinasi dengan pejabat pada Unit kerja yang menguasai dan mengelola informasi untuk melakukan pengklasifikasian Informasi Publik.				Formulir permohonan informasi yang telah lengkap diisi, dan/atau DIK periode sebelumnya, serta regulasi terkait Keterbukaan Informasi Publik	7 hari kerja	Daftar Informasi dari Unit Kerja yang hendak diuji konsekuensinya	Uji Konsekuensi dilakukan pada tiga waktu, yakni sebelum adanya permohonan informasi publik, saat adanya permohonan informasi publik, saat penyelesaian sengketa informasi publik atau perintah majelis komisioner.
2	Memberikan pertimbangan atas informasi / dokumen yang dimaksud yang bersifat rahasia berdasarkan UU Keterbukaan Inforemasi Publik No 14/2008 dan atau UU lainnya dengan mempertimbangkan kepentingan masyarakat				Formulir permohonan informasi yang telah lengkap diisi, dan/atau DIK periode sebelumnya, serta regulasi terkait Keterbukaan Informasi Publik, serta daftar informasi dari unit kerja yang hendak diuji konsekuensinya.	1 hari kerja	Naskah pertimbangan tertulis dan konsep surat Keputusan Klasifikasi Informasi Publik	Seluruh dokumen pendukung dan dokumen output diarsipkan.
3	Melaporkan hasil pertimbangan tertulis kepada Pimpinan Badan Publik untuk mendapatkan persetujuan				Naskah pertimbangan tertulis dan Konsep Surat Keputusan Klasifikasi Informasi Publik	1 hari kerja	Surat Keputusan Pimpinan Badan Publik tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan lengkap dengan Naskah Pertimbangan Tertulis	

No	Kegiatan	PELAKSANA			MUTU BAKU			Keterangan
		PPID Pelaksana	Pejabat pada Unit Kerja yang Menguasai dan Mengelola Informasi	Atasan PPID	Kelengkapan	Waktu	OUTPUT	
4	Mengumumkan Surat Keputusan Pimpinan Badan Publik tentang Daftar Informasi yang Dikecualikan melalui Website dan saluran informasi lainnya				Surat Keputusan Pimpinan Badan Publik tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan lengkap dengan Naskah Pertimbangan Tertulis konsep konten/berita pengumuman	1 hari kerja	Pengumuman Daftar Informasi yang Dikecualikan	Pengumuman dilakukan melalui website dan media sosial yang dikelola oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Jateng
	Selesai	